KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Minim karya, ruang kerja malah dipercantik
Tanggal : Senin, 17 November 2014
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 22

Minim Karya, Ruang Kerja malah Dipercantik

Wakil rakyat akan lebih afdal berpikir apa yang akan disumbangkan kepada rakyat selama menjabat di DPR bukan mendahulukan fasilitas yang justru bisa meninabobokan mereka.

Astri Novaria

'Angin ribut' di gedung wakil rakyat Senayan belum juga menunjukkan tanda-tanda reda. Di tengah-tengah prahara yang mengisahkan egoisme elite yang mendominasi parlemen itu, tiba-tiba Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono melemparkan gagasannya untuk menambah luas dan fasilitas ruangan anggota dewan yang baru saja terpilih dan masih egois tersebut.

Waktu itu alasan Roem bahwa gedung parlemen yang terlihat masih berdiri megah sekarang ini sudah tidak memadai lagi untuk mendukung kinerja wakil rakyat beserta staf ahli dan staf pribadinya.

"Daya tampung Gedung DPR RI sekarang ini tidak bisa mendorong produktivitas kinerja DPR," ujarnya.

Selain itu, kebutuhan ruang untuk para staf anggota dewan juga perlu mendapat perhatian khusus. Saat ini, setiap anggota dewan menempati ruang kerja seluas 4 x 7 meter (28 m2) yang harus ditata untuk mengakomodasi kebutuhan ruang kerja satu anggota dewan, 5 staf ahli dan 2 asisten pribadi yang melekat.

Ruangan yang sempit bisa menyebabkan anggota DPR tidak betah. Karena bertambahnya jumlah tenaga ahli (dari dua menjadi lima), menurut Roem, perlu ada ruang untuk mengakomodasi mereka. Idealnya, imbuhnya, ruangan anggota DPR periode ini minimal 90 meter persegi seperti di UU Pejabat Negara yang mengatur masalah fasilitas.

Untuk memenuhi kebutuhan penambahan ruangan seluas itu tentu akan sulit dilakukan dengan mendesain ulang tata letaknya. Pembangunan gedung baru adalah salah satu alternatifnya.

Roem tentu boleh saja bicara ideal. Tidak ada yang melarang. Namun, idealisme Roem tadi bersinggungan dengan bujet negara jawabannya 'tunggu dulu.'

Ada beberapa pertimbangan yang lebih penting untuk diperhatikan. Pertama, di tengah-tengah semangat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk melakukan efisiensi di semua lini pemerintahan dan lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, perluasan ruangan anggota DPR sepertinya gugur demi rakyat.

Selain itu, sangat naif jika memberikan fasilitas mewah kepada anggota dewan yang kinerjanya belum tampak bahkan terlihat 'amburadul' itu. Jangan-jangan penambahan dan perbaikan mutu fasilitas ruangan akan mereka rusak sendiri pada saat pikiran buntu mencari solusi masalah kerakyatan yang memang terwariskan ruwet. Kekhawatiran ini beralasan, belum lama ini anggota dewan mempertontonkan menggulingkan meja saat paripurna berlangsung. Belum lagi, jika fasilitas ruang kerja dibuat lebih nyaman, mereka akan pulas tertidur dan melupakan tugas kerakyatannya. Masih banyak lagi alasan yang memberatkan penambahan dan peningkatan kualitas ruang kerja anggota DPR.

Wakil rakyat yang benar justru seharusnya lebih banyak berada di luar kantornya untuk lebih dekat dengan konstituennya, menyerap permasalahan kerakyatan secara langsung sebagai bahan masukan pembuatan aturan hukum yang berguna serta bermanfaat. Bukan lebih banyak menghabiskan waktunya di ruangan kerja dan hanya melaksanakan fungsi *budgeting* dan menerima tamu-tamunya.

Di negara-negara yang sistem demokrasinya bagus,

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

ruangan anggota parlemen tidak menjadi persoalan mendesak. Yang BURT pikirkan ialah mendesain ruang pertemuan/rapat yang luas dan transparan. Coba lihat saja suasana ruang rapat di gedung parlemen, Senayan. Semua serba-tertutup rapat, mencerminkan keberadaan mereka tersekat dari rakyatnya.

Ketua Forum Pemantau Parlemen Indonesia (Formapi) Sebastian Salang menilai gagasan membangun gedung baru DPR RI sangat berbahaya apabila tidak dicermati sejak awal. "Terlebih gagasan ini muncul dalam situasi konflik dualisme yang masih terjadi di DPR RI hingga saat ini."

Menurut Sebastian, meski ide perluasan ruangan ataupun pengadaan gedung baru DPR masih sebagai gagasan pribadi akan lebih baik sejak awal langsung dianggap serius.

Yang lebih menyakitkan, imbuh Sebastian, anggota DPR saat ini sedang dalam situasi konflik sejak mereka dilantik sampai sekarang. Mereka lebih memikirkan bagaimana menguasai politik parlemen daripada apa yang seharusnya mereka kerjakan sebagai wakil rakyat.

Selain itu, pembangunan gedung baru akan menelan anggaran yang sangat besar seperti yang pernah mencuat pada saat DPR periode (2009-2014). Rencana serupa pada 2010 silam membutuhkan biaya yang fantastis, yaitu senilai Rp1,8 triliun atau Rp10,9 juta per meter perseginya sehingga menjadi pertanyaan besar, gagasan tersebut dimunculkan kembali pada awal periode ini. Ini sama halnya menunjukkan BURT DPR RI tidak memiliki desain utuh lewat kajian studi yang komprehensif terhadap kebutuhan yang diperlukan.

Upaya DPR yang parsial ini mengisyaratkan apa yang mereka lakukan tidak dibuat desain yang utuh tentang bagaimana melakukan reformasi terhadap lembaga DPR. "Parsial maksudnya, menambah staf ahli itu dasar berpikir logisnya bagaimana? Kenapa lima, kenapa tidak 10, misal? Ini yang menurut saya seharusnya DPR itu membuat dulu studi yang komprehensif mengenai apakah gedung ini cukup memadai atau tidak?" pungkasnya.

Jika dilihat dari kondisi gedung yang sudah ada, menurut Ketua Asosiasi Kontraktor Gedung dan Permukiman Indonesia Edi Ganefo, kondisi Gedung DPR saat ini masih layak untuk digunakan sepuluh tahun ke depan.

Audit ruangan

Sudah saatnya penyelenggara negara saat ini tidak berpikir seperti 'mata kuda' yang melihat alokasi anggaran sebagai *copy paste* penganggaran tahun-tahun sebelumnya. Kejelian pemanfaatan anggaran yang lebih bermanfaat lebih penting.

Terkait kondisi gedung parlemen, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Parliamentary Centre (IPC) Sulistio akan lebih baik BURT mengadakan audit ruangan. Jangan asal 'ngomong' membangun gedung baru DPR di saat masyarakat menyaksikan kinerja DPR buruk.

"Sebenarnya banyak ruangan di Senayan yang terbengkalai dan itu bisa dimanfaatkan untuk anggota dewan." Dia menyebut, sejumlah ruangan di Nusantara V. Selama ini yang berkantor di Nusantara V hanya pimpinan MPR. Itu pun tidak setiap hari sehingga bisa dipakai untuk ruangan staf anggota dewan.

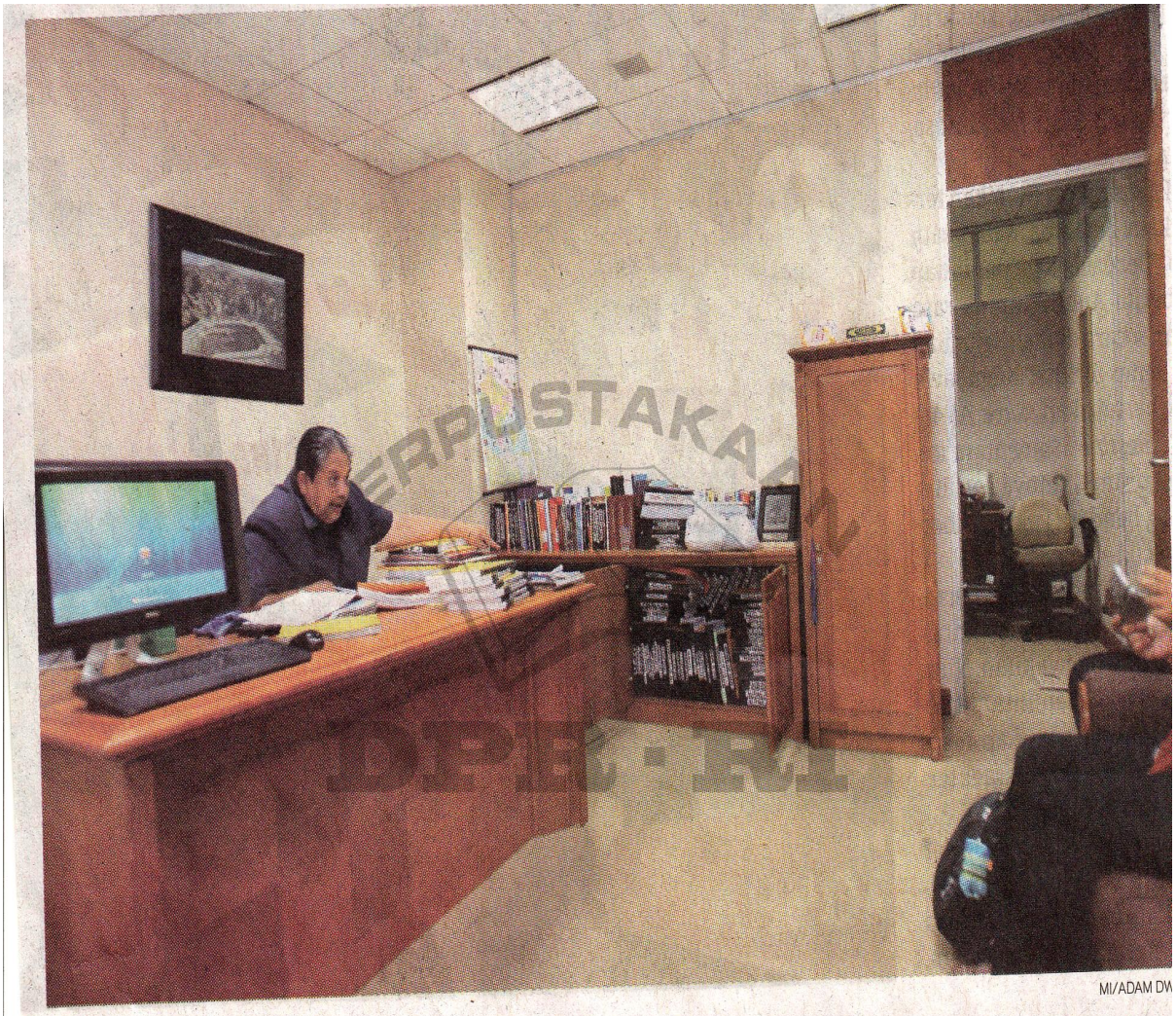
Di Gedung Nusantara I, jelas Sulistio, harus dikurangi bebannya ke Gedung Nusantara lain yang selama ini kurang difungsikan. Misalnya ruang rapat di Gedung Nusantara II dan III yang jarang terpakai. Selain itu, masih banyak unit-yang selama ini tidak berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja anggota dewan. "Misalnya, kantor bank atau kafe di Nusantara II. Unit-unit seperti ini bisa diletakkan di belakang gedung.

Dibanding membangun gedung baru, Sulistio menyarankan, efektivitas dan audit ruangan parlemen. Setelah audit, kata dia, akan terlihat bahwa masih banyak ruangan di Senayan yang masih bisa difungsikan untuk kebutuhan anggota dewan.

Peneliti Formapi Lucius Karus menambahkan di tengah krisis anggaran, penghematan ialah keniscayaan. Bahkan, menurutnya, tidak hanya gedung baru, beberapa pos pengeluaran DPR harus dipangkas. "Seperti studi banding. Belum ada sejarahnya DPR bisa menghasilkan UU dari studi banding. Ini harusnya dihilangkan," ujarnya.

Pos lain yang harus dikurangi adalah biaya reses. Akuntabilitas pos ini, menurut dia, pertanggungjawabannya masih sumir akibat dana yang diturunkan bersifat gelondongan. "Pola hidup sederhana harus dimulai dari pemimpin dengan contoh, baru rakyat akan mengikuti," pungkasnya. (Pol/SU/Cah/P-2)

astri@mediaindonesia.com



MI/ADAM DW

RUANG KERJA: Ruang kerja anggota DPR yang pernah ditempati Nudirman Munir. Belum genap dua bulan bekerja, Ketua BURT DPR periode 2014-2019 Roem Kono sudah mengusulkan perluasan dan penambahan fasilitas dengan dalih ruang kerja saat ini sempit dan tidak memadai.